

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataan Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998).
- Harsono, Boedi. "Hukum agraria Indonesia." *Buku Dosen-2014* (2015).
- Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum." (2006).
- Moleong, Lexy J. "Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi." (2007).
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020).
- M. Hadjon, Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).
- Oloan Sitorus, Carolina Sitepu, and Herawan Sauni. *Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. Dasamedia Utama, 1995.
- Pahlefi. "Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria." *Majalah Hukum Forum Akademika* 25, no. 1 (March 2014).
- Panggabean, Hetty, Pelindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Parlindungan, Adi Putera. Berakhirnya hak hak atas tanah:(menurut sistem UUPA). Mandar Maju, 1990.
- Parthiana, I. Wayan. *Hukum pidana internasional dan ekstradisi*. Yrama Widya, 2003.
- Philipus, M. Hadjon. "Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." *Bina Ilmu, Surabaya* 25 (1987): h2.

- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi Fauzi, and Yulita Purbawati. "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)*. Jakarta (2016).
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Richo Andi Wibowo, and Stevanus Hizkia Gunawan. *Pelindungan Hukum Terhadap Keputusan Dan Perbuatan Pemerintah: Perkembangan Kasus Dan Kiritik Subsantatif” Dalam Hukum Administrasi Negara: Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer Dan Kasus*. Edited by Richo Andi Wibowo. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2024.
- Rizal F. Aji, Wisnu M. Suryaningrat. “Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi / AG. Subarsono.” Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), 2024.
- Salim, H. S. "Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi." (2013).
- Salindeho, John. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, 1987.
- Salle, Aminuddin. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Total Media, 2007.
- Schmitt, Russell J, and Craig W Osenberg. *Detecting Ecological Impacts*. Elsevier, 1996.
- Setya Pratiwi, Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Edited by Prof. Adriaan W. Bedner Imam Nasima. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.
- Soedjono, Dirdjosisworo. "Pengantar Ilmu Hukum." *RajaGrafindo Persada* (1984).
- Shalihah, Fithriatus. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019.

- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. 1986. Reprint, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2009.
- Sumardjono, Maria SW. "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada* (2014).
- Sumardjono, Maria S. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Supranto, Johannes. "Metode penelitian hukum dan statistik." (2003).
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2006.
- Sugiyono, Dr. "Memahami penelitian kualitatif." (2010).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014
- S. Lev, Daniel. *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Yauri Yunus, Ahmad, Dkk. *Bencana Alam Dan Manajemen Risiko Bencana*. Tohar Media, 2024.
- Yogi Zul Fadhli, Dkk. *Membunuh Demokrasi: Catatan Akhir Tahun 2020*. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, 2020.

B. Artikel Jurnal

- Agung Wardana. "Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener Di Purworejo, Jawa Tengah." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (April 26, 2022): 1–41. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41>.
- Anwar. "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (June 10, 2010).
- Bagoes Soenarjanto. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik." *Widya Publika* 7, no. 1 (June 11, 2019): 1–12.

<https://doi.org/10.47329/widyapublika.v7i1.626>.

Dwintari, Julita. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia." *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya* 2 (2018): 69–81.

Hendrik Mezak, Meruy. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006).

Irna Rudiana, None Amiludin, and Ahmad. "Implementasi Teoritik Dan Praktik Asas Tujuan Hukum Pada Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Strategis Nasional." *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas* 2, no. 2 (January 12, 2023): 15–32. <https://doi.org/10.30656/jika.v2i2.5734>.

Ismi, Hayatul. "Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014).

Koeswahyono, Imam. "Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2008): 1-19.

Nugroho, Adam Wahyu, and Ika Agustin Kurniawati. "Penyelesaian Kasus Wadas di Jawa Tengah oleh Pemerintah melalui Putusan MA No. 482 KTUN." *Jurnal Mediasi* 3, no. 1 (2024): 45-65.

Oktarina, Evi, Liza Deshaini, and Bambang Sugianto. "Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Administrasi Publik di Indonesia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (June 4, 2021): 151. <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.440>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885)

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119)

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107)

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940)

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 13)

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 13)

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2021

Putusan Mahkamah Agung No. 6126 K/PDT/2024

Putusan Mahkamah Agung No. 36 K/TUN/2024

Putusan Banding PT Yogyakarta No. 51/PDT/2024/PT.YYK

Putusan Banding PTTUN Jakarta No. 168/B/2023/PT.TUN.JKT

Putusan PTUN Semarang No. 68/G/PU/2021/PTUN.SMG

Putusan PTUN Jakarta No. 388/G/2022/PTUN.JKT

Putusan PN Sleman No. 235/PDT.G/2023/PN.SMN

E. Internet

Admin LBH Yogyakarta. “Gempadewa Menggugat Dirjen Minerba Kementerian Esdm Dan Melawan Tambang Ilegal Di Wadas - LBH Yogyakarta.” LBH Yogyakarta, November 2, 2022. <https://lbhyogyakarta.org/2022/11/02/gempadewa-menggugat-dirjen-minerba-kementerian-esdm-dan-melawan-tambang-ilegal-di-wadas/>.

Admin LBH Yogyakarta. “Komitmen Komnas HAM Kawal Dan Tuntaskan Pelanggaran HAM Terhadap Warga Wadas - LBH Yogyakarta.” *LBH Yogyakarta*, September 29, 2021. <https://lbhyogyakarta.org/2021/09/29/51720/>.

Agus Sahbani. “Problematika Penerapan Eksepsi Dalam Praktik Peradilan Perdata.” *hukumonline.com*, March 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-eksepsi-dalam-praktik-peradilan-perdata-lt64087074a2149/?page=all>.

Akbar, Caesar. “LBH Yogyakarta: 307 Kepala Keluarga Tolak Kuari Bendungan Bener Di Desa Wadas.” *Tempo.co*. TEMPO.CO, April 26, 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1456427/lbh-yogyakarta-307-kepala-keluarga-tolak-kuari-bendungan-bener-di-desa-wadas>.

Annur, Cindy Mutia. “Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa Hingga Pertengahan 2023 | Databoks.” *databoks.katadata.co.id*, July 13, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>.

Ardyamarthanino, Verelladevanka, and Tri Indriawati. “Kronologi Kasus Wadas.” *KOMPAS.com*. Kompas.com, November 26, 2023.

<https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/26/140000979/kronologi-kasus-wadas?page=all>.

bbcnews. “Wadas - ‘Gesekan’ Antar Warga Desa, Kata Pemerintah Namun Pegiat Menyebut ‘Pembungkaman’ Atas Penolakan Masyarakat - BBC News Indonesia.” BBC News Indonesia. BBC News Indonesia, February 9, 2022.

<https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-60322206>.

Bhakti Suryani. 2022. “Warga Wadas Ditangkapi, Listrik Dimatikan & Internet Diputus! Kapolri Diminta Turun Tangan.” *Harianjogja.com*, February. <https://doi.org/1094916/wadas-1>.

Chusna Farisa, Fitria, ed. “Duduk Perkara Konflik Di Desa Wadas Yang Sebabkan Warga Dikepung Dan Ditangkap Aparat Halaman All - Kompas.com.” KOMPAS.com. Kompas.com, February 9, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk-perkara-konflik-di-desa-wadas-yang-sebabkan-warga-dikepung-dan?page=all>.

CNN Indonesia. “Ganjar Pernah Terbitkan SK Tanah Bendungan Bener, Termasuk Wadas.” *cnnIndonesia.com*, February 11, 2022. <https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20220211204529-20-758250/ganjar-pernah-terbitkan-sk-tanah-bendungan-bener-termasuk-wadas>.

DA, Ady Thea. “4 Catatan Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Wadas.” *hukumonline.com*, March 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-catatan-kritis-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-wadas-lt62296c3421efb/>.

Hari, Jauh. “Warga Wadas Gugat Jokowi, Ganjar Hingga Menteri Basuki Di PN Sleman.” *detikjogja*. detikcom, December 2023. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7066753/warga-wadas-gugat-jokowi-ganjar-hingga-menteri-basuki-di-pn-sleman>.

Heru Suyitno. “Ombudsman RI Audiensi Dengan Warga Wadas.” *Antara News*. ANTARA, February 14, 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2703481/ombudsman-ri-audiensi-dengan-warga-wadas>.

Shinta Maharani. “Kalah Di PTUN Semarang, Warga Wadas Ajukan Kasasi.” Edited by Syailendra Persada. *Tempo.co*. TEMPO.CO, September 15, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1506385/kalah-di-ptun-semarang-warga-wadas-ajukan-kasasi>.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, "Perkara Nomor 388/G/2022/PTUN.JKT," Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, diakses 2 Maret 2024

https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Semarang, "Perkara Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG," Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, diakses 2 Maret 2024

https://sipp.ptun-semarang.go.id/index.php/detil_perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sleman, "Perkara Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Smn," Pengadilan Negeri Sleman, diakses 2 Maret 2024

https://sipp.pn-sleman.go.id/index.php/detil_perkara

Wiratman, Herlambang P. "Konstitusionalisme Ruang Hidup." *Kompas.id*, March 2, 2022.

<https://www.kompas.id/baca/artikelopini/2022/02/28/konstitusionalisme-ruang-hidup>.

F. Karya Ilmiah

Hikmaya Febrianti, Ima. "Penolakan Gugatan Warga Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tentang Penambangan Batuan Andesit Perspektif Masalah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Nedara Nomor: 68/G/PU2021/PTUN.SMG)." 2023.